

SIKAP INDONESIA TERHADAP ISU PENYADAPAN AMERIKA SERIKAT DAN AUSTRALIA

Lisbet^{*)}



Abstrak

National Security Agency (NSA)/Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) dituduh telah menyadap jutaan data komunikasi pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia. Penyadapan terhadap Indonesia dilakukan oleh NSA AS bekerja sama dengan Direktorat Sandi Pertahanan (DSD) Australia. Dengan adanya isu penyadapan ini, hubungan bilateral Indonesia dengan AS maupun Australia menjadi terganggu. Pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar dari AS dan Australia untuk meminta penjelasan mengenai masalah ini.

A. Pendahuluan

NSA AS dituduh telah menyadap jutaan data komunikasi pemerintah di banyak negara. Alasan penyadapan ini adalah karena AS ingin mendapatkan informasi lebih dulu di bidang politik, diplomasi, dan ekonomi untuk mengantisipasi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah negara-negara sahabatnya tersebut. Hal ini terungkap setelah terbongkarnya dokumen rahasia yang diberikan oleh bekas kontraktor NSA Edward Snowden pada majalah "Der Spiegel." Pada laporan tersebut diketahui bahwa AS memiliki 90 fasilitas penyadapan yang lokasinya tersebar di seluruh dunia. Fasilitas ini termasuk 74 fasilitas berawak, 14 fasilitas dioperasikan dari jarak jauh dan dua fasilitas dioperasikan dari pusat dukungan teknis.

Di Asia Timur, upaya penyadapan AS difokuskan pada China, dengan fasilitas yang terletak di Kedutaan Besar AS di Beijing dan konsulat AS di Shanghai, Chengdu dan kantor diplomatik AS di Taipei. Sementara untuk wilayah Asia Tenggara, diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh, dan Yangon. Selain itu, alat penyadap juga terpasang di negara-negara sekutu AS seperti Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang, dan Singapura.

B. Respons Negara-Negara Sahabat

AS melakukan penyadapan komunikasi para kepala pemerintahan negara-negara

^{*)} Peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: lisbet.sihombing@dpr.go.id



sahabatnya seperti Jerman, Perancis, Brasil, dan Meksiko. Hal ini memunculkan kemarahan pada pihak negara-negara sahabat AS tersebut. Pada awalnya, Jerman tidak memberikan kritik terbuka karena tidak ingin hubungan kedua negara terganggu. Namun, setelah mengetahui laporan tentang penyadapan telepon Kanselir Jerman Angela Merkel, pemerintah Jerman pun akhirnya melakukan kritik tajam dan protes diplomatik yang cukup keras dengan cara memanggil Duta Besar AS John B. Emerson di Berlin untuk memberikan keterangan.

Sama halnya dengan Pemerintah Jerman, pemerintah Perancis pun memanggil Duta Besar AS Charles Rivkin di Paris terkait aksi penyadapan yang dilakukan oleh AS. Reaksi keras ini muncul dari Presiden Perancis Francois Hollande yang menuntut agar aksi penyadapan dihentikan. Berdasarkan laporan Snowden, NSA diketahui telah menyadap lebih 70 juta hubungan telepon di Perancis yang direkam antara 10 Desember 2012–8 Januari 2013.

Aksi penyadapan ini juga semakin memperkeruh hubungan bilateral Brasil dan AS. Penyadapan komunikasi yang dilakukan AS terhadap Presiden Brasil Dilma Rousseff telah membuat Presiden Rousseff marah besar sehingga membatalkan rencana kunjungannya ke AS.

Tidak cukup sampai di situ, Pemerintah Jerman dan Brasil pun membawa isu penyadapan ini ke tingkat pemimpin dunia. Pemerintah Jerman dan Brasil membawa isu penyadapan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendukung pembatasan spionase. Bahkan kedua negara mengusulkan pembuatan draf resolusi Majelis Umum PBB untuk pengawasan khusus yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pengintaian komunikasi negara. Resolusi ini diperlukan agar terdapat garis batas yang jelas antara isu keamanan yang sah dan hak privasi individu.

Lain halnya dengan Pemerintah Meksiko. Isu penyadapan telepon Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto yang dilakukan AS memang membuat hubungan kedua negara menjadi sensitif, akan tetapi Pemerintah Meksiko tetap berusaha untuk tidak bereaksi keras dan tidak melontarkan kritik tajam sehingga dapat meredakan situasi.

C. Penyadapan di Indonesia

Indonesia pun tak luput dari penyadapan yang dilakukan oleh AS. Penyadapan terhadap Indonesia dilakukan NSA AS bekerja sama dengan Direktorat Sandi Pertahanan (DSD) Australia. Sebagai contoh, NSA AS meminta bantuan DSD Australia untuk mematai-matai Indonesia pada waktu Konferensi Perubahan Iklim PBB yang diadakan di Bali, tanggal 3–14 Desember 2007. Penyadapan kala itu dilakukan AS dan Australia guna memantau struktur jaringan komunikasi keamanan Indonesia.

Selain melakukan penyadapan pada waktu Konferensi Perubahan Iklim, DSD Australia juga melakukan penyadapan terhadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan para pemimpin Indonesia lainnya. Alasan Australia membantu AS melakukan penyadapan adalah untuk memajukan kepentingan nasionalnya sendiri serta sebagai kontribusi terhadap aliansi dengan AS. Penyadapan yang dilakukan Australia ternyata telah berlangsung dalam berbagai bentuk selama 20 tahun sampai 30 tahun.

Adapun pola kerja sama yang digunakan oleh AS pada waktu melakukan penyadapan adalah Kedutaan Besar AS mengirimkan sinyal dari program khusus intelijennya yang bernama *Stateroom* ke kantor konsulat dan misi diplomatik sejumlah mitra intelijennya yakni Australia, Inggris, dan Kanada. Pemerintah AS menyimpan perangkat penyadapan untuk mengumpulkan komunikasi elektronik di Kantor Kedutaan Besar AS, Inggris, Australia, dan Kanada yang ada di Jakarta. Dari sana, AS baru melakukan penyadapan kepada negara-negara yang hendak disadap termasuk Indonesia.

D. Respons Indonesia

Dengan adanya isu penyadapan ini, dapat dipastikan bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan AS maupun Australia menjadi terganggu. Penyadapan yang dilakukan AS melalui kedutaan besarnya di Jakarta dianggap sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan wilayah. Oleh karena itu pemerintah Indonesia

mengajukan protes keras atas penyadapan ini. Pemerintah Indonesia akan mengkaji ulang kerja sama dengan Australia menyusul dugaan aksi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia. Sikap Australia tidak menunjukkan sikap bersahabat dengan Indonesia. Aksi penyadapan itu lanjutnya juga telah mencederai kepercayaan Indonesia pada Australia. Pemerintah Indonesia akan meninjau kerja sama pertukaran informasi, pemberantasan penyelundupan manusia dan terorisme. Pemerintah sangat tidak menerima aksi penyadapan yang dilakukan negara sahabat di kedutaan mereka di Jakarta karena sebagai negara yang berdaulat, Indonesia punya kerangka kerja resmi untuk hal itu.

Tindakan penyadapan merupakan sebuah jalan pintas dalam mencari informasi yang bertentangan dengan Konvensi Wina mengenai kode tata berperilaku yang menjadi hukum internasional tentang fungsi kedutaan. Bentuk protes keras yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negerinya adalah memanggil Duta Besar dari AS dan Australia untuk meminta penjelasan. Akan tetapi, bentuk protes ini masih dianggap kurang konkret oleh sebagian kalangan termasuk anggota DPR-RI. Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Tb. Hasanuddin bahkan menyarankan agar pemerintah Indonesia membawa isu penyadapan ini ke Mahkamah Internasional. Lebih jauh lagi, Pemerintah bahkan dianjurkan untuk membatalkan sementara kerja sama dengan AS di bidang ekonomi dan pertahanan.

Sementara itu, kemarahan rakyat Indonesia terhadap sikap Australia dilakukan sekelompok *hacker* alias peretas yang menggunakan identitas *Anonymous Indonesia* mengambil alih ratusan laman internet Australia dengan alamat *online* yang berakhiran dengan *.au*. Para *hacker* mengklaim telah meretas 178 laman internet Australia sebagai respons protes atas laporan keterlibatan Australia memata-matai Indonesia. Mereka mengubah halaman depan ratusan laman internet itu dengan menulis sebuah pesan untuk Pemerintah Australia.

E. Langkah ke Depan

Keberhasilan penyadapan terhadap pemerintah Indonesia oleh pihak asing membuktikan masih lemahnya intelijen Indonesia dalam mengurus keamanan nasional. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan dalam melindungi informasi rahasia negara dengan cara membuat alat khusus agar sandi maupun kode yang digunakan tidak dapat dilacak maupun disadap. Pemerintah Indonesia mendukung dan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman dan Brasil untuk mengajukan draf resolusi Majelis Umum PBB terkait pembatasan spionase. Pemerintah pun telah mengkaji ulang kerja sama dan kepercayaan terhadap pemerintah AS dan Australia sampai terdapat penyelesaian dari isu ini. Indonesia akan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain yang mengalami hal serupa (korban penyadapan) untuk melakukan aksi, termasuk kemungkinan menjadi *co-sponsor* resolusi PBB dalam pemberantasan aksi penyadapan terhadap pejabat pemerintah suatu negara oleh pemerintah negara lain.

Langkah lain yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penyadapan karena sampai saat ini belum ada UU yang mengatur hal tersebut. Selama ini aturan mengenai penyadapan itu tersebar dalam sejumlah undang-undang, misalnya, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 40), dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12). Juga UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 31), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 Angka 19, Pasal 75 Huruf i, Pasal 77, dan Pasal 78), dan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Pasal 31, 32, dan Pasal 47).

F. Penutup

Penyadapan merupakan pelanggaran serius atas etika hubungan internasional dan norma hukum internasional. Kasus penyadapan ini telah menyebabkan menurunnya kepercayaan Indonesia terhadap AS dan Australia. Kondisi tersebut dinilai dapat merusak hubungan bilateral antara Indonesia dan kedua negara. Indikasi kuat tindakan penyadapan oleh AS dan Australia terhadap Indonesia menunjukkan dua negara tersebut mengabaikan peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Kawasan strategis Asia Pasifik yang sedang membangun stabilitas ekonomi dan pertahanannya ini dibangun dengan ketidakpercayaan dan kecurigaan satu sama lain.

Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas menghadapi masalah penyadapan ini. Sebagai salah satu negara mitra strategis Indonesia, tindakan AS dan Australia melakukan penyadapan dinilai tidak mencerminkan sikap persahabatan. Penyadapan dianggap bertentangan dengan hukum internasional karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma hubungan diplomatik. Untuk itu, pemerintah AS dan Australia perlu segera melakukan upaya pengembalian kepercayaan yang diberikan oleh Indonesia. Upaya pengembalian kepercayaan ini harus ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah AS dan Australia.

Rujukan:

1. "Australia Tidak Ingin Merusak Hubungan," *Kompas*, 9 November 2013, hlm. 9.
2. "AS Sadap Telepon Merkel, Jerman Protes," <http://www.dw.de/.../a-17180273>, diakses 6 November 2013.
3. "SBY Didesak Terbitkan Perpu Penyadapan," <http://nasional.sindonews.com/read/2013/11/02/14/801252>, diakses 6 November 2013.
4. "Ketua DPR: AS Tak Patut Menyadap Negara Sahabat," <http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/30/14/800195>, diakses 6 November 2013.
5. "Jerman dan Brasil Serukan Resolusi PBB," *Suara Pembaruan*, 8 November 2013, hlm. A8.
6. "Australia-AS Mata-matai Konferensi Bali," *Media Indonesia*, 4 November 2013, hlm. 12.
7. "Amerika Akui NSA Langgar Batas," *Republika*, 2 November 2013, hlm. 8.
8. "Australia Sadap Komunikasi Presiden SBY," *Suara Pembaruan*, 1 November 2013, hlm. A9.
9. "Australia Diduga Agen Spionase AS untuk Asia," *Suara Pembaruan*, 31 Oktober 2013, hlm. A8.